

## Daftar Isi

Struktur Kepengurusan Jurnal	i
Pengantar Redaksi	ii
Daftar Isi	v
1. PERAN MEDIA CETAK DALAM MENGAWAL KEBIJAKAN PUBLIK DI KOTA AMBON Said Lestaluho	1-17
2. GOOD GOVERNANCE SEBAGAI LANDASAN MEMBANGUN KEPERCAYAAN Sarifa Niapele	18-26
3. RELEVANSI PEMEKARAN DAERAH DENGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL Johan Tehuayo	27-34
4. FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MARDIKA KOTA AMBON Wahab Tuanaya	5-42
5. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA AMBON DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MARDIKA Josephus Noya	43-49
6. EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MARDIKA KOTA AMBON Noer Syam Muhrim	50-57
7. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BURU DALAM PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT TERASING SUKU BUPOLO DI DESA WAEFLAN KECAMATAN WAEAPO In Hutuely	58-70
8. ISLAM, MODAL SOSIAL DAN PENGENTASAN KEMISKINAN PADA MASYARAKAT KEPULAUAN Atikah Khairunnisa	71-81
9. PERAN PEMERINTAH ADAT DALAM MANAGEMENT KONFLIK DI TANAH PUTIH Joana J. Tuhumury	82-88
10. SATWA LIAR TIDAK DILINDUNGI SEBAGAI HAMA PENYEBAB KEMISKINAN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, PROVINSI MALUKU Elsina Titaley	89-100

11. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Masyarakat (Suatu Studi Tentang Program Pembangunan Desa Di Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon)  
Mohamad Arsad Rahawarin \_\_\_\_\_ 101-112

## SATWA LIAR TIDAK DILINDUNGI SEBAGAI HAMA PENYEBAB KEMISKINAN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, PROVINSI MALUKU

Elsina Titaley\*

### Abstrak

Secara umum diperoleh anggapan bahwa bila suatu daerah/wilayah memiliki sumberdaya alam yang melimpah, akan berpotensi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Anggapan ini berbeda dengan kenyataan yang dialami oleh masyarakat pedesaan di Provinsi Maluku terutama di Kabupaten Seram Bagian Timur yang menjadi wilayah penelitian untuk tulisan ini. Dengan berlimpahnya sumberdaya alam berupa satwa liar yang tidak dilindungi bukan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun sebagai hama yang telah menghancurkan berbagai usaha pertanian berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat. Terhadap hama yang memiliki nilai jual antara lain burung Perkici Pelangi, Nuri Maluku, dan Nuri Telinga Biru, diperlukan pemberdayaan masyarakat untuk penangkapan dan perdagangannya yang akan berakibat pada berkurangnya ancaman hama, terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, sekaligus sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

**Kata Kunci: satwa liar, hama, kemiskinan, pemberdayaan**

### A. PENDAHULUAN

Pada tanggal 2 Juli 2013, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku menjelaskan bahwa berdasarkan hasil Sensus Ekonomi Nasional, ternyata Provinsi Maluku menduduki peringkat ketiga sebagai provinsi termiskin di Indonesia, setelah Provinsi Papua dan Papua Barat. Posisi ini bertahan dari tahun 2005 sampai 2012. Pada tahun 2012, penduduk miskin di Maluku mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya, begitu juga untuk tahun 2013, namun tetap pada peringkat yang sama. Dari jumlah penduduk di Maluku sebanyak 1.616.046 orang, terdapat penduduk miskin dan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada bulan September 2012 sebanyak 338.890 orang (20,97 persen). Pada tanggal 20 Februari 2015, Kepala BPS Provinsi Maluku menyebutkan jumlah penduduk miskin atau penduduk yang pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan di Maluku pada bulan Maret 2014 sebanyak 316.110 orang (19, 13%) dari jumlah penduduk Maluku. Dengan jumlah sedemikian, maka Provinsi Maluku menduduki peringkat ke 4 sebagai provinsi termiskin di Indonesia, dan untuk masyarakat di Kabupaten Seram

---

\* Dosen Sosiologi FISIP, Univ. Pattimura, Ambon  
Mahasiswa Program Doktorat, Prodi Sosiologi, Univ. Brawijaya, Malang

Bagian Timur (SBT) terdapat angka kemiskinan yakni sebesar 24,29 % dari jumlah penduduk SBT sebesar 104.902 jiwa yang terdiri dari 53.371 orang laki-laki dan 51.531 orang perempuan sesuai hasil sensus tahun 2013. Posisi tersebut masih lebih baik dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sebesar 29,75 %, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sebesar 29,25%, Kabupaten Kepulauan Aru sebesar 27,34%, Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 25,06%, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) sebesar 24,63%. Dibawah Kabupaten SBT adalah Kabupaten Tual sebesar 23,28%, Kabupaten Maluku Tengah sebesar 22,15%, Kabupaten Buru sebesar 18,51%, Kabupaten Buru Selatan sebesar 17,05 dan Kota Ambon 4,421. Walaupun masyarakat Maluku dikategorikan sebagai masyarakat miskin, namun wilayah Maluku memiliki sumberdaya alam (SDA) yang kaya. Wilayah Maluku dapat menghasilkan besaran nilai keuntungan kurang lebih sejumlah Rp. 400 trilyun setiap tahun dari produksi Gas Alam Cair Blok Masela yang mengandung kurang lebih 14 trilyun kaki kubik cadangan Gas Alam Cair. Jumlah tersebut belum termasuk kurang lebih 3 (tiga) blok gas alam cair yang belum dikelola<sup>2</sup> dan besaran nilai keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 40 trilyun (besaran nilai jumlah keuntungan tersebut, pada saat ini dicuri dari laut Maluku) setiap tahun dari hasil laut yang tidak akan pernah habis jika dilindungi dan dibudidayakan dengan baik<sup>3</sup>. Dengan demikian, telah terjadi ketidakseimbangan pembangunan yang nyata selama ini. Untuk tulisan ini, yang disoroti adalah potensi satwa liar yang tidak dilindungi dalam hal ini adalah Burung Perkici Pelangi (*trichoglossus maematodus*), Nuri Maluku (*eos bornea/rubra*) dan Nuri Telinga Biru (*eos semilarvata*) saat ini sebagai hama, yang bila dikelola secara baik akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya bila burung ini tetap dibiarkan, akan memberikan dampak bagi peningkatan angka kemiskinan masyarakat, karena sebagai hama, telah menghancurkan hasil tanaman yang menjadi mata pencaharian masyarakat.

Dalam rangka memperoleh data untuk tulisan ini, Penulis menggunakan penelitian kualitatif, sehingga angka-angka dari pengakuan informan bukan data kuantitatif.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN.

### 1. Pandangan teori tentang kemiskinan dan penyebabnya.

#### a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang kompleks. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Sumodiningrat (1998: 26), bahwa kemiskinan bersifat multidimensional, dalam arti berkaitan dengan

<sup>1</sup> Data-data tersebut diperoleh dari *Surat Kabar Harian Siwalima tanggal 22 Februari 2015 Halaman 1.*

<sup>2</sup> Dimuat pada *Harian Pagi Siwalima*, nomor : 242 tahun XV, hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014, halaman 1.

<sup>3</sup> Dimuat pada *Harian Pagi Siwalima*, nomor : 279 tahun XV, hari Jum'at, tanggal 12 Desember 2014, halaman 1; dan *Harian Pagi Suara Maluku*, hari Jum'at, tanggal 12 Desember 2014, halaman 1.

aspek sosial, ekonomi, budaya, politik dan aspek lainnya. Oleh karena kemiskinan adalah permasalahan yang sifatnya multidimensional, maka pendekatan dengan satu bidang ilmu tertentu tidaklah mencukupi untuk mengurai makna dan fenomena yang menyertainya. Sajogyo (2006: 229) mengatakan bahwa secara teoritis kemiskinan dapat dan harus diukur, bukan untuk tujuan kuantitatif empiris ilmu, tetapi agar langsung menjangkau target yakni manusia yang paling berkompeten; orang-orang miskin itu sendiri sebagai subjek pengentasan. Salim dalam Ala (1981: 1-3) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Bank Dunia (2000) mengartikan kemiskinan adalah kekurangan yang sering diukur dengan tingkat kesejahteraan (dalam Indra Maipita 2014), sedangkan Indra Maipita mendefinisikan kemiskinan sebagai sejauh mana suatu individu berada di bawah standar hidup minimal yang dapat diterima oleh masyarakat atau komunitasnya. Seseorang dikatakan miskin bila ia berada di bawah tingkat kesejahteraan minimum tertentu yang telah disepakati. Sedangkan Niementz (dalam Indra Maipita, 2014) menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan dan obat-obatan. Hendari Saporini (dalam Puji Wahono, et.al, 117) mengatakan bahwa orang miskin adalah mereka yang tergolong paling jauh dari standar kondisi hidup layak.

Robert Chambers (dalam Loekman Soetrisno, 1997: 18) melihat bahwa kemiskinan yang dialami oleh rakyat negara sedang berkembang khususnya rakyat pedesaan, disebabkan oleh beberapa faktor yang disebut sebagai ketidakberuntungan yang saling terkait satu sama lain. Menurutnya (Chambers), ada 5 ketidakberuntungan yang melingkari kehidupan orang atau keluarga miskin yakni: (1) kemiskinan (*poverty*), (2) fisik yang lemah (*physical weakness*), (3) kerentanan (*vulnerability*), (4) keterisolasian (*isolation*), dan (5) ketidakberdayaan (*powerlessness*).

Untuk itu, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

#### b. Penyebab Kemiskinan

Beberapa sarjana yang mengulas tentang penyebab kemiskinan antara lain Munker (2001) dalam Eddy Chiljon Papilaya (2013: 49) menjelaskan bahwa sebab-sebab utama kemiskinan di pedesaan adalah

ketidakmampuan masyarakat menghadapi kondisi-kondisi yang berubah karena (a) kondisi kesehatan dan fisik yang lemah karena kekurangan gizi dan penyakit; (b) pengalaman yang menjadi sumber pengetahuan tidak relevan dengan perkembangan zaman; (c) ketiadaan akses terhadap teknologi; (d) sumber pendapatan yang tidak terjamin; (e) kondisi pemerintahan, hukum, dan politik tidak berpihak pada kaum miskin; dan (f) bias perkotaan dan terbatasnya infrastruktur pedesaan. Dari pendapat Soetrisno R (2001), Sumodiningrat (1998), Ginanjar Kartasasmita (1996) dapat diketahui bahwa penyebab kemiskinan terdiri dari (1) *Kemiskinan natural*, (2) *Kemiskinan kultural*, dan (3) *Kemiskinan struktural*. *Kemiskinan natural* adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya pembangunan, atau walaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. *Kemiskinan kultural* adalah kemiskinan yang muncul karena faktor budaya atau mental masyarakat yang mendorong orang hidup miskin. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan walaupun kenyataannya mereka berada dalam keadaan tidak berkecukupan dan sangat kekurangan. Sikap hidup yang mengakibatkan orang menjadi miskin antara lain malas, bersifat masa bodoh, tidak disiplin. Walaupun mereka berada dalam keadaan miskin namun mereka menganggap sebagai tidak miskin, jadi mereka acuh terhadap kemiskinan yang dialami. *Kemiskinan struktural* adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia, yakni kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Hal yang terjadi antara lain struktur perekonomian yang timpang dalam masyarakat, baik karena kebijakan ekonomi pemerintah, distribusi aset produksi yang tidak merata, penguasaan faktor-faktor produksi oleh segelintir orang, monopoli, korupsi dan kolusi antara pengusaha dan pejabat, kebijakan ekonomi yang tidak adil, serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.

Nurkese (dalam Sumodiningrat. 1998: 150) berpendapat bahwa masalah-masalah kemiskinan tersebut sebagai suatu "*lingkaran setan kemiskinan*" yang meliputi enam unsur, yaitu: Keterbelakangan, Kekurangan modal, Investasi rendah, Tabungan rendah, Pendapatan rendah, Produksi rendah.

## 2. Kemiskinan di Kabupaten SBT.

Kabupaten SBT sebagai kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Dengan undang-undang tersebut maka Kabupaten Maluku Tengah dimekarkan menjadi Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten SBT, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Kabupaten Pulau Buru. Kabupaten Pulau Buru kemudian dimekarkan lagi pada tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 menjadi Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Buru Selatan. Pada saat dimekarkan, tingkat kemiskinan masyarakat di Kabupaten SBT mencapai 62% sesuai data BPS tahun 2006. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa sejak dimekarkan, telah terjadi percepatan laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat yang sangat tinggi. Dapat dibayangkan, hanya dalam waktu 8 (delapan) tahun terjadi penurunan angka kemiskinan mencapai 38% menjadi 24,29 %. Namun bila diteliti pada kedalamannya, ternyata tingkat kesejahteraan yang dicapai itu, banyak dinikmati oleh segelintir orang yakni pada jajaran birokrasi pemerintahan, politisi dan pengusaha yang berorientasi pada pekerjaan proyek-proyek yang dibiayai oleh biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi maupun kabupaten. Selain itu, dengan adanya 2 (dua) tambang minyak dan gas bumi yang beroperasi di Kabupaten SBT sedikit memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kabupaten SBT memiliki 14 (empat belas) kecamatan, yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan yang terdapat di Pulau Seram (tanah besar) dan 6 (enam) kecamatan di pulau-pulau kecil. Ancaman hama burung-burung tersebut berada di negeri-negeri dan desa-desa dalam kecamatan di Pulau Seram (tanah besar) yang meliputi:

- a. Kecamatan Bula Barat dengan negeri-negeri dan desa-desa yang ada di dalamnya yakni: Desa Banggoi, Negeri Waematakabo, Desa Jakarta Baru (desa transmigran), Desa Sumber Agung (desa transmigran), Negeri Hote.
- b. Kecamatan Bula dengan negeri-negeri dan desa-desa yang ada di dalamnya yakni: Desa Bula Air, Desa Tansi Ambon, Negeri Waru, Desa Bonfia Gunung, Desa Dawang, Desa Salas dan Dusun Teon.
- c. Kecamatan Tutuk Tolu dengan negeri-negeri dan desa-desa yang ada di dalamnya yakni: Desa Air Kasar, Desa Bati Kilwouw, Negeri Danama, Negeri Ga, Negeri Kilbat, Negeri Kilmoi, Desa Sesar, Desa Walang Tenga, Negeri Waras-waras.
- d. Kecamatan Kian Darat dengan negeri-negeri dan desa-desa yang ada di dalamnya yakni: Desa Angar, Desa Artafela, Desa Kilaba, Negeri Kian darat, Desa Kileser, Desa Kilga Kilwouw, Desa Kilga Watubau, Desa Rumfakar, Desa Rumoga, Desa Watu-watu.

- e. Kecamatan Lian Fitu dengan negeri-negeri dan desa-desa yang ada di dalamnya yakni: Negeri Kwaos, Desa Air Nanang, Desa Suru, Desa Keta, Dusun Birit dan Desa Lintasik, Desa Keta Rumadan, Negeri Kian Laut.
- f. Kecamatan Kelimuri dengan negeri-negeri dan desa-desa yang ada di dalamnya yakni: Desa Mising, Desa Selot, Desa Kelibon, Desa Dawang, Desa Nekan, Desa Ta, Negeri Kelimuri, Desa Wolok, Desa Undur.
- g. Kecamatan Werinama dengan negeri-negeri dan desa-desa yang ada di dalamnya yakni: Negeri Werinama, Negeri Hatumeten, Desa Bemo, Desa Funa Nayaba, Desa Batuasa, Desa Osong, Desa Tum dan Desa Gusalaut.
- h. Kecamatan Siwalalat dengan negeri-negeri dan desa-desa yang ada di dalamnya yakni: Desa Polin, Desa Tunsai, Negeri Atiahu, Desa Nawel, Desa Elnusa, Desa Adabai, Dusun Balakeu dan Desa Abuleta.

Sedangkan kecamatan dengan desa-desa yang berada di pulau-pulau yakni Kecamatan Gorom Timur, Kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Pulau Panjang, Kecamatan Seram Timur, Kecamatan Teor dan Kecamatan Wakate. Semua desa di semua kecamatan yang berada di Pulau Seram (tanah besar) maupun yang berada di pulau-pulau kecil terdapat masyarakat miskin dan di bawah garis kemiskinan di dalamnya.

Dalam perjalanan penelitian ke desa-desa dalam kabupaten tersebut, ditemukan rumah penduduk yang masih sangat sederhana yang terbuat dari dinding papan dan beratapkan rumbia (daun sagu), yang diambil dari pohon kayu hutan dan tumbuhan sagu milik masyarakat setempat. Sebagian besar penduduk pedesaan bermata pencaharian sebagai petani, dengan hasil yang minim karena gangguan hama tanaman Burung Perkici Pelangi, Nuri Maluku dan Nuri Telinga Biru, burung Kaka Tua, Burung Perling Mata Merah, dan Babi Hutan. Selain ketergantungan penduduk pedesaan pada hasil pertanian, juga mereka mengandalkan potensi laut untuk kebutuhan hidup mereka yang hasilnya lebih banyak untuk konsumsi rumah tangga, karena peralatan tangkap masih sangat sederhana. Ada juga anggota masyarakat yang menggunakan alat tangkap modern, berupa perahu dengan menggunakan mesin dengan jaring tanggap yang agak canggih, namun jumlahnya masih sangat terbatas dan tidak berada pada semua desa; bagi mereka yang memperoleh bantuan dari pemerintah atas kedekatan mereka dengan pejabat birokrasi pemerintahan maupun para legislator tingkat kabupaten. Pada kabupaten ini, hanya ada satu perguruan tinggi agama, sehingga untuk melanjutkan pendidikan tinggi jurusan lain, anak-anak mesti menjalaninya di Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku atau di Kota Masohi sebagai ibi kota Kabupaten Maluku Tengah, juga pada kota-kota lain yang ada perguruan tingginya; yang mengakibatkan pengeluaran penduduk bagi kebutuhan kelanjutan



pendidikan anak-anak menjadi lebih mahal dan memberatkan. Dengan kondisi pendidikan sedemikian, berpengaruh pada tingkat kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh kabupaten tersebut. Hal ini dapat dibuktikan pada kinerja pegawai, dimana bila berurusan pada kantor-kantor pemerintah pada jam-jam kerja, ternyata ditemukan banyak pegawai yang menganggur dan berbicara di luar tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) yang diemban, dan banyak pegawai yang berkeliaran di wilayah kota kabupaten bukan untuk tugas kantor. Kinerja pegawai sedemikian, sangat berpengaruh pada pelayanan masyarakat, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan di kabupaten ini masih rendah. Tingkat kemiskinan tersebut ternyata tidak sesuai dengan potensi alam yang dimiliki. Rata-rata setiap desa pada Kabupaten SBT khususnya desa-desa adat (negeri), memiliki potensi alam yang melimpah. Banyak desa memiliki wilayah petuanan yang luas yang meliputi petuanan darat dan petuanan laut. Petuanan darat meliputi wilayah perkampungan, wilayah kebun dan *aong*<sup>4</sup>, wilayah dusun dan wilayah *ewang*<sup>5</sup>. Selain petuanan pada wilayah darat, masyarakat adat juga memiliki wilayah petuanan laut yakni wilayah *meti*<sup>6</sup>, wilayah *saaru*<sup>7</sup> dan wilayah air laut. Semua wilayah ini menyimpan potensi yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Kabupaten SBT.

3. Burung Perkici Pelangi (*trichglossus maematodus*), Nuri Maluku (*eos bornea/rubra*) dan Nuri Telinga Biru (*eos semilarvata*) sebagai hama penyebab kemiskinan.

Masyarakat pedesaan di Kabupaten SBT memandang bahwa Burung Perkici Pelangi, Nuri Maluku dan Nuri Telinga Biru, juga Burung Perling Mata dan Babi Hutan sebagai hama utama penghancuran tanaman masyarakat yang mengakibatkan mereka tetap berada dalam kondisi miskin. Selain di Kabupaten SBT, burung-burung ini dapat dijumpai juga di Kabupaten Maluku Tengah dan di Kabupaten Seram Bagian Barat, di Pulau Buru, di Pulau Tanimbar Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Pulau Wetar di Maluku Barat Daya, juga Pulau Halmahera dan Pulau Obi Maluku Utara. Burung-burung ini, selalu memakan hasil tanaman penduduk berupa bunga dan buah jambu, bunga durian, buah langsung, buah duku, bunga dan buah rambutan, buah mangga, buah pisang dan berbagai pucuk daun kayu hutan seperti pucuk daun manggrof, pucuk daun rotan dan sebagainya. Rata-rata

<sup>4</sup> Aong adalah bekas kebun yang dibiarkan agar secara alamiah memperoleh kesuburan untuk dapat dimanfaatkan lagi menjadi kebun.

<sup>5</sup> Ewang adalah wilayah petuanan/hak ulayat masyarakat adat berupa hutan belukar dan pohon-pohon hutan yang belum dikelola yang berfungsi sebagai penyanggah lingkungan terutama untuk mata air (sumber air) bagi kebutuhan manusia dan hewan.

<sup>6</sup> Wilayah meti adalah wilayah kering pada saat air laut surut, dan berair pada saat air pasang, yang menjadi wilayah pantai yakni batas antara wilayah darat dan wilayah laut.

<sup>7</sup> Wilayah saaru adalah wilayah permukaan tanah di laut yang nampak di permukaan laut pada saat air surut.

semua desa di kabupaten ini khususnya desa-desa yang berada di Pulau Seram (tanah besar), mengetahui waktu makan burung-burung ini, setiap pagi mulai sekitar jam 06.00 s/d jam 10.00 waktu setempat, diserbu oleh burung ini dengan jumlah ribuan ekor pada setiap desa. Pada sore hari mulai sekitar jam 16.00 s/d jam 17.30 waktu setempat, burung-burung ini kembali mencari makan. Informan kunci maupun masyarakat umum menjelaskan bahwa jumlah burung-burung tersebut tidak dapat terhitung banyaknya secara pasti karena terlalu banyak pada setiap kelompok. Setiap kelompok diperkirakan serendah-rendahnya dapat mencapai antara 200 s/d 300 ekor.

Oleh karena burung-burung ini kehadirannya berkelompok-kelompok dalam jumlah yang besar, maka sangatlah sulit untuk menghalaukannya. Setiap kali kehadirannya dapat menghancurkan berapapun hasil tanaman yang tersesedia pada saat tanaman-tanaman tersebut mulai berbunga. Burung-burung tersebut bukan saja mengisap sari bunga tanaman dan pohon buah-buahan tetapi juga memakan dan menghancurkan bunga-bunga tersebut, sehingga tidak dapat menghasilkan buah. Terhadap bunga tanaman/tumbuhan langsa dan duku yang tidak dimakan, namun pada saat sudah menjadi buah yang sudah mulai terasa manis, selalu menjadi makanan burung-burung tersebut. Dengan demikian, masyarakat tidak pernah menikmati hasil-hasil tanaman yang mereka usahakan. Informan kunci menjelaskan kemiskinan yang dialami antara lain: (1). Dari setiap pohon kelapa, menghasilkan satu tangkai (rambut) setiap bulan, pada setiap tangkai serendah-rendahnya menghasilkan 10 buah. Harga 1 buah di desa = Rp.1000. Setiap dusun paling sedikit terdapat 200 pohon kelapa. Pada setiap desa paling sedikit terdapat 10 dusun (2). Dari setiap pohon durian, menghasilkan paling sedikit 100 buah setiap tahun. Harga 1 buah di desa = Rp.3000. Pada setiap desa paling sedikit terdapat 50 pohon. (3). Dari setiap pohon cempedak, menghasilkan paling sedikit 50 buah setiap tahun. Harga 1 buah di desa = Rp.3000. Pada setiap desa paling sedikit terdapat 100 pohon. (4). Dari setiap pohon langsung dan duku, menghasilkan paling sedikit 1 keranjang setiap tahun. Harga setiap keranjang di desa = Rp.300.000. Pada setiap desa paling sedikit terdapat 100 pohon. Belum dihitung kerugian dari Babi Hutan. Dengan perhitungan masyarakat yang sangat derhana dan sangat masuk akal itu, kita dapat membayangkan betapa besar kerugian yang dialami akibat ancaman hama burung-burung tersebut.

Perkembangan burung-burung ini sangat cepat. Setiap induk burung dapat menghasilkan 3 (tiga) butir telur, dan setiap tahun sebanyak 5 (lima) kali bertelur dari 1 (satu) induk<sup>8</sup>. Dapat dibayangkan, dengan jumlah induk

---

<sup>8</sup> Omkicau.com.burung

mencapai ratusan ribu ekor, maka tingkat pertumbuhan jumlahnya sangat tinggi, sebaliknya upaya pengambilan atau pembasmiannya tidak dilakukan, sehingga walaupun masyarakat desa memiliki etos kerja yang tinggi namun mereka tetap miskin.

Selain hama Burung Perkici Pelangi, Nuri Maluku, dan Nuri Telinga Biru di Kabupaten SBT terdapat juga hama dari satwa liar tidak dilindungi antara lain:

- a. Babi Hutan (*Sus Scofa*). Yang menjadi makanan satwa ini adalah umbi-umbian yang diperoleh dari tanaman masyarakat berupa ketela pohon, ubi jalar, talas. Juga buah-buahan yang jatuh ke tanah, termasuk buah dan anakan kelapa, buah dan anakan pepaya, buah kenari, anakan dan buah jagung dan sebagainya.
- b. Burung Perling Mata Merah (*Aplonis Panayensis*). Yang menjadi makanan satwa ini adalah buah cabe (cili).

Juga, satwa liar yang dilindungi yang telah menjadi hama antara lain burung kakak tua (*cacatua moluccensis*). Di desa-desa pada Kecamatan Tutuk Tolu, dan Kecamatan Kelimuri, burung kakak tua menghancurkan buah kelapa yang masih muda milik masyarakat yang masih berada pada pohonnya, buah durian, buah cempedak dan lain-lain. Dengan serangan hama ini, sudah sangat jarang masyarakat dapat menikmati buah kelapa hasil tanaman mereka. Bila masyarakat ingin menggunakan buah kelapa, maka mereka mesti pergi dan membeli ke kota kecamatan yang didatangkan oleh pedagang lokal dari kecamatan lain.

#### 4. Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten SBT.

Bila dengan menggunakan patokan hasil gas alam cair dan hasil laut, rakyat Maluku, putut bila tidak perlu mengerjakan banyak hal lagi. Namun tentu tidaklah demikian, karena dengan kondisi masyarakat Maluku khususnya masyarakat di Kabupaten SBT dengan potensi yang dimiliki, mesti memanfaatkan potensi tersebut oleh masyarakat lokal melalui pemberdayaan mereka. Pemberdayaan masyarakat agar masyarakat dapat memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki guna mengatasi permasalahan kemiskinan yang mereka hadapi. Menyangkut pemberdayaan maka diperoleh pendapat antara lain yang dikemukakan oleh Ife (1995), Parsons, et. al (1995), Swift dan Levin (1987), dan Rappaport (1984) semuanya sebagaimana yang dikemukakan oleh Edi Suharto (2005: 58), memiliki pendapat yang intinya pemberdayaan adalah upaya yang bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan (*humanisme*). Juga, Janggan Sargowo dan Soemarno (2009: 3), Soetomo (2011: 69), Randi R. Wrihanolo dan Riant Nugraha Dwidjowinoto (2007: 2-3), Harry Hikmat, (2010:2) semuanya mengulas tentang pemberdayaan berintikan bahwa pemberdayaan masyarakat menggunakan pendekatan pekerjaan sosial yaitu mendorong

kelompok masyarakat bermasalah dengan memanfaatkan potensi yang ada pada masyarakat dengan melibatkan sumber di dalam masyarakat agar kelompok masyarakat tersebut dapat mandiri mengatasi masalahnya. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam hal ini pemberdayaan potensi yang dimiliki masyarakat lokal yakni potensi fisik dan potensi sosial untuk dimanfaatkan bagi pengentasan kemiskinan; dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dari potensi-potensi tersebut. Untuk itu, dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kabupaten SBT, dalam hal ini terhadap masyarakat pedesaan yang mendiami Pulau Seram (tanah besar) mesti dilakukan sebagai upaya memandirikan mereka untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi dengan memanfaatkan potensi SDA yang dimiliki, dengan cara memberikan keterampilan kepada masyarakat untuk menjadi penangkap Burung Perkici Pelangi, Nuri Maluku dan Nuri Telinga Biru maupun jenis-jenis burung dan satwa liar lainnya seperti babi hutan dan lain-lain, untuk mengurangi populasi, tidak merusak burung-burung tersebut sehingga pada saat diperdagangkan harganya tidak menjadi turun atau menjadi tidak berharga. Dengan demikian, hasil penjualan burung-burung tersebut dapat membantu peningkatan ekonomi keluarga.

Melalui informan kunci dan masyarakat umum dijelaskan bahwa apabila ada pedagang yang siap untuk membeli Burung Perkici Pelangi, Burung Nuri Maluku, dan Nuri Telinga Biru maka setiap penangkapan paling sedikit tiap orang yang menekuni pekerjaan tersebut akan memperoleh tangkapan sekurang-kurangnya sebanyak 20 sampai 30 ekor. Bila dijual kepada pedagang lokal dengan nilai jual setiap ekor sebesar Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah), maka sedikit-dikitnya setiap orang akan memperoleh sebanyak Rp.800.000 s/d Rp.1.200.000,- Bila pada setiap desa terdapat paling sedikit 10 orang penangkap, maka hasil yang diperoleh pada setiap desa setiap waktu tangkap dapat mencapai Rp.8.000.000.- s/d Rp.12.000.000.-; sebagai suatu jumlah yang sangat besar bagi masyarakat pedesaan di kabupaten tersebut. Oleh informan kunci disebutkan beberapa kesulitan dalam penangkapan Burung Perkici Pelangi, Burung Nuri Maluku dan Nuri Telinga Biru antara lain:

- a. Mesti memiliki keterampilan memanjat pohon. Pada masyarakat desa, keterampilan ini biasa dimiliki oleh anak-anak remaja dan pemuda berbadan kurus, bukan berbadan tambun/gemuk. Hal ini karena pada saat memanjat pohon mesti berpindah dari ranting ke ranting pohon tersebut untuk memasang jerat.
- b. Pada saat pemasangan jerat, pada ranting-ranting pohon, mesti memperhitungkan tempat hinggap dan tempat jalan burung-burung tersebut sehingga pada saat hinggap atau berjalan, burung tersebut kena pada jerat yang dipasang.

- c. Biasanya bila burung-burung tersebut telah kena jerat pada suatu lokasi, maka pada waktu makan berikutnya atau hari berikutnya burung-burung tersebut tidak hinggap lagi pada pohon-pohon tersebut. Untuk itu mesti dilakukan pemasangan pada beberapa lokasi.
- d. Pada saat penangkapan biasanya terdapat jerat penangkap yang rusak, sehingga perlu dilakukan perbaikan atau memasang perangkap yang baru.
- e. Bila tidak berhati-hati dapat beresiko terjatuh dari pohon yang mengakibatkan luka ringan, luka berat atau meninggal dunia.
- f. Saat ini tidak ada pedagang yang bersedia membeli burung, dengan alasan belum diperoleh izin dari Pemerintah.

Alat yang digunakan untuk membuat jerat hanya dengan menggunakan tali mika (tasi) yang agak besar sehingga tidak mudah putus pada saat digigit burung. Berbeda dengan burung kakak tua sebagai satwa yang dilindungi, penangkapannya dilakukan dengan cara memasang jerat pada buah-buah pohon kelapa, buah cempedak dan buah durian dengan tingkat kesulitan tersendiri pula. Sedangkan penangkapan Babi Hutan dengan cara ditikam, dipasang jerat atau diberikan racun. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut seharusnya Pemerintah memberikan peluang yang cukup bagi dilakukannya penangkapan dan perdagangan satwa-satwa liar tidak dilindungi selain upaya lainnya untuk menghalau hama tersebut.

### C. KESIMPULAN

Provinsi Maluku yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) wilayah kabupaten/kota di dalamnya terdapat SDA yang kaya, bila dikelola akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; sebaliknya akan berakibat SDA tersebut akan menjadi penyebab timbulnya kemiskinan masyarakat, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat di wilayah Kabupaten SBT. Banyaknya satwa liar tidak dilindungi dalam hal ini Burung Perkici Pelangi (*trichglossus maematodus*), Nuri Maluku (*eos bornea/rubra*) dan Nuri Telinga Biru (*eos semilarvata*) telah menjadi hama, berakibat kemiskinan pada masyarakat. Masyarakat lokal mesti diberdayakan untuk menangkap burung-burung tersebut untuk dapat diperdagangkan, untuk memperkecil ancaman hama sekaligus hasil penjualannya dapat digunakan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Juga, Pemerintah mesti memberikan keterampilan penangkapan kepada masyarakat lokal dan memberikan peluang bagi perdagangan burung-burung tersebut secara bebas. Selain itu, terdapat ancaman dari sarwa liar tidak dilindungi berupa babi hutan dan Burung Mata Merah, mesti juga dilakukan penangkapan dan pembasmian terhadapnya sehingga tidak mengancam ekonomi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ala. B. 1981. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Yogyakarta: Liberty
- Hikmat, Harry. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Edisi Revisi), Bandung: Humaniora.
- Kartasasmita Ginandjar, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat – Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka CIDESINDO.
- Maipita Indra. 2014. *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Papilaya Eddy Chiljon. 2013. *7 Kiat Percepatan Pengurangan Kemiskinan Dan Pemiskinan Bangsa*, Bandung: PT. Penerbit ITB Press.
- Sajogyo, Pujiwati Sajogyo. 2002. *Sosiologi Pedesaan – Kumpulan Bacaan, Jilid 1*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sargowo Janggan, Soemarno. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat Produktif Untuk Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran*, (tanpa penerbit).
- Soetomo. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetrisno Lukman. 1997. *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Soetrisno R. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*, Yogyakarta: Philosophy Press.
- Suharto Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama.
- Sumodiningrat, G. 1999 *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta: Gramedia.
- Wahono Puji, Dwi Astuti, Sabiq Carebesth. 2011. *Ekonomi Politik Pangan-Kembali ke Basis dari Ketergantungan ke Kedaulatan*, Jakarta: Comedia Publisber.
- Wrihanolo Randi R, Riant Nugraha Dwidjowinoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk memberdayakan Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia.